

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam hubungan internasional aliansi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Aliansi adalah keadaan dimana negara-negara sedang dalam kondisi bersekutu atau bersatu. Aliansi adalah kelompok individu yang kredibel dimana anggotanya disatukan untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan semua anggota kelompok. Tujuan-tujuan tersebut dapat memuat kepentingan dalam bidang apapun seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lain sebagainya. Dalam hubungan internasional aliansi digunakan untuk menghadapi berbagai ancaman. Aliansi adalah sebuah kegiatan yang bersifat *take and give* dengan anggota yang masuk bersifat selektif. Membentuk aliansi dapat berguna bagi kelompok individu, agensi, negara atau organisasi yang menghadapi tanggung jawab dan peran yang membebani sumber daya alam, kemampuan manusia, maupun kemampuan finansial yang mereka miliki.

Dalam dunia internasional, tidak menutup kemungkinan bagi munculnya berbagai macam aliansi yang dibentuk oleh negara-negara di dunia. Banyak aliansi dikelilingi oleh beberapa kontroversi dimana mereka hanya mengkonsolidasikan dua agen perubahan: kekuasaan dan kepentingan. Selain memunculkan manfaat bagi anggota kelompoknya, aliansi juga dapat menciptakan kewaspadaan dari pihak atau aliansi lain, yaitu kewaspadaan terhadap kombinasi aliansi yang mencampur kekuatan dan kepentingan, karena hal tersebut dapat menciptakan potensi untuk mengecualikan pihak lain. Dalam hal tersebut, pengecualian atau eliminasi dapat terjadi karena adanya ketidaksepemahaman dan ketidaksamaan tujuan.

Sama halnya yang terjadi pada aliansi negara-negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau disebut Gulf Coopertion Council (GCC). Dewan kerjasama yang terdiri dari enam anggota negara Teluk, yaitu : Uni Emirat Arab, Kerajaan Bahrain, Kerajaan Arab Saudi, Kesultanan Oman, Negara Qatar dan Negara Kuwait (gcc-sg.org) tersebut terbentuk di Riyadh, Saudi Arabia, pada bulan Mei 1981. Awalnya hubungan diplomatik antar negara anggota GCC tersusun apik

dalam sebuah aliansi yang berjalan normal dan semestinya sampai muncul konflik besar ketika tuduhan pro terorisme dan pro Iran dilayangkan pada salah satu anggotanya, Qatar.

Qatar adalah negara yang berdiri sejak tanggal 3 September 1971. Qatar merupakan negara kecil yang dipimpin oleh keluarga Al-Thani sejak pertengahan 1800-an. Qatar telah diperintah oleh keluarga Al-Thani sejak Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani mendirikan negara Qatar pada awal abad ke-19 (Metz, 1993). Setelah pemerintahan Ottoman, Qatar menjadi negara jajahan Inggris di awal abad 20 sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971 (Metz, 1993). Di awal masa kemerdekaannya, Qatar membangun negaranya menggunakan sebagian besar tenaga kerja ahli asing, dengan dana dari pendapatan minyak yang ia temukan sejak tahun 1939, dimana pendapatan tersebut yang mendominasi ekonomi Qatar. Bukan hanya pendapatan minyak yang secara dramatis mengubah ekonomi masyarakat, tetapi juga akan memberikan fokus untuk perselisihan domestik dan hubungan luar negeri Qatar (Metz, 1993). Dalam sejarahnya Qatar sudah mulai memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Bahrain dan Arab Saudi akibat sengketa perbatasan wilayah.

Di tengah masa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, kondisi politik di Qatar juga banyak mengalami dinamika positif dan negatif. Qatar sempat mengalami revolusi dalam pemerintahan ketika Mantan amir Hamad bin Khalifa Al Thani menggulingkan ayahnya dalam kudeta tak berdarah pada tahun 1995 (cia.gov, 2018). Kudeta tersebut mengantar reformasi politik dan media yang meluas sehingga membuat peran kepemimpinan regional Qatar kian berkembang (cia.gov 2018). Qatar menjadi negara yang semakin terpandang setelah Al-Jazeera, jaringan media yang ia miliki berkembang pesat dan oleh perannya sebagai mediator di beberapa konflik regional.

Pertumbuhan ekonomi dan sosial Qatar bertumbuh semakin pesat mulai pada tahun 2000-an, dimana Qatar dapat menyelesaikan sengketa perbatasannya dengan Bahrain dan Arab Saudi dan pada tahun 2007 (cia.gov 2018). Selain itu Qatar juga merupakan negara yang memiliki ketahanan ekonomi sangat kuat. PDB Qatar hampir selalu mengalami fluktuasi naik. Qatar sempat

berhasil mencapai pendapatan per kapita tertinggi di dunia tahun 2012, yaitu mencapai \$146.872 (imf.org 2018). Qatar merupakan negara kecil di Timur Tengah yang sering menempati peringkat sebagai salah satu negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia. Populasi penduduk Qatar adalah sekitar 2,27 Juta jiwa, sehingga menurut data dari IMF, total PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Qatar mencapai \$124.930 per orang dan menjadikannya negara terkaya di dunia sampai pada tahun 2017

Dengan kekayaannya tersebut, Qatar selalu dapat bertahan dalam konflik-konflik regional, salah satunya Qatar tidak ikut mengalami kerusuhan domestik atau kekerasan seperti yang terjadi di negara-negara MENA (*Middle East and North Africa*) pada peristiwa Arab Spring tahun 2010-2011. Pada pertengahan 2013, Hamad dengan damai turun tahta dan mewariskan tahta kekuasaan kepada putranya, Amir Tamim bin Hamad. Saat ini, Tamim tetap populer di kalangan masyarakat Qatar, karena telah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan domestik Qatar, termasuk membangun sistem perawatan kesehatan dan pendidikan yang canggih dan memperluas infrastruktur negara dalam mengantisipasi penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Doha (cia.gov 2018).

Kekayaan yang dimiliki Qatar juga menciptakan *bargaining position* yang cukup strategis di Timur Tengah. Sekalipun begitu, di tahun 2017 silam, hubungan Qatar dengan tetangganya tengah mengalami ketegangan. Setelah pecahnya kerusuhan regional pada tahun 2011, tepatnya ketika Doha membanggakan diri atas dukungannya untuk banyak revolusi di Timur Tengah, khususnya di Libya dan Suriah, dimana sikap tersebut menjadi awal dimana krisis diplomatik Qatar dimulai. Sumbu konflik di dalam Teluk Persia yang melibatkan Qatar berlanjut di tahun 2014 ketika Arab Saudi dan UEA yang sementara menarik Duta Besar masing-masing dari Doha pada Maret 2014 (cia.gov 2018) yang didasari oleh kritik terhadap media Qatar Al-Jazeera yang dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Arab lainnya (bbc.com, 2014). Tamim kemudian berusaha mendinginkan suasana melalui penandatanganan Perjanjian Riyadh dengan Mediasi dari Kuwait.

Setelah perjanjian Riyadh tersebut hubungan diplomatik antar negara anggota di dalam GCC tersebut sempat kembali berjalan normal. Namun, pada Juni 2017, Kuartet Anti-Qatar: Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar sebagai dugaan atas pelanggaran Perjanjian Riyadh 2013-2014 (**perjanjian ada dalam lampiran**). Ketegangan antara Qatar dengan negara-negara Teluk lainnya memang sudah terjadi sejak lebih dari dua dekade silam. Tetapi puncak perselisihan mereka adalah ketika Arab Saudi sebagai pemimpin di negara Teluk mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan melakukan blokade besar-besaran. Alasan utamanya adalah karena Qatar mendukung Iran dan diduga mendanai kegiatan terorisme. Dimana kedua hal tersebut merupakan tindakan fatal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan tujuan yang dipegang teguh oleh negara-negara Teluk. Sehingga Qatar harus menerima sanksi pengucilan oleh beberapa negara berpengaruh di Teluk seperti Arab Saudi, UEA, Bahrain ditambah Mesir dalam aksi blokade Qatar yang menyebabkan Qatar mengalami krisis diplomatik terburuk di tahun 2017.

Yang menarik dan menjadi masalah dalam kasus ini adalah Qatar mempersiapkan kebijakan luar negeri yang baru dengan memusatkan hubungannya dengan Teheran. Sejak gagalnya mediasi dari Kuwait yang menghasilkan 13 tuntutan negara kuartet pasca Krisis Diplomatik Juni 2017, Qatar telah memutuskan hubungan dengan tiga anggota negara GCC, mengabaikan 13 tuntutan yang dilayangkan oleh kuartet anti-Qatar, dan memperkuat aliansinya dengan Iran. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari penulis bahwa mengapa Qatar lebih memilih untuk memperkuat aliansinya dengan Iran daripada patuh kepada tuntutan Kuartet, melihat bahwa Iran merupakan musuh dari sebagian besar negara-negara Teluk dan Iran juga menjadi akar perselisihan antara Qatar dengan Kuartet anti-Qatar. Melalui langkah Manuver Politik Doha ke Teheran akan muncul bab baru dalam kehidupan politik dan ekonomi di wilayah Teluk.

Pada penelitian sebelumnya, fokus penelitian yang dilakukan oleh akademisi dalam menganalisis krisis diplomatik Qatar adalah melalui sudut pandang ekonomi politik internasional. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Qatar menjadi faktor utama pemicu pemutusan

hubungan diplomatik. Dengan alasan kekhawatiran Arab Saudi atas pertumbuhan ekonomi Qatar dan juga pengaruh ekonomi politiknya di kawasan Timur Tengah (Masyifa, 2018). Melalui konsep stabilitas hegemon, penelitian tersebut juga berargumen bahwa Qatar akan muncul sebagai negara hegemon baru di Timur Tengah karena kekuatan ekonominya sendiri.

Bukannya mempercayai argumen tersebut sebagai satu-satunya faktor penyebab permasalahan ini, peneliti malah bersikap ragu. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini, peneliti akan berusaha untuk melihat krisis diplomatik Qatar ini dari perspektif lain yaitu melalui konsep *Bandwagoning* yang merupakan turunan dari teori neorealis. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menjelaskan alasan utama terjadinya krisis diplomatik Qatar tahun 2017 dan faktor-faktor yang membuat kebangkitan tersendiri bagi Qatar. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan kebijakan manuver politik yang dilakukan Qatar pasca krisis diplomatik tahun 2017 yaitu penguatan aliansi dengan Iran, serta menganalisis manfaat dan akibat yang dapat timbul.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ditarik oleh penulis adalah : Mengapa Qatar melakukan manuver politik dan memperkuat Aliansi dengan Iran daripada patuh kepada negara-negara Teluk yang menjadi Kuartet Anti-Negaranya dalam kasus Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah yang sudah diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Mengetahui penyebab kerenggangan hubungan diplomatik Qatar dengan Kuartet (Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir) sampai puncak Krisis Diplomatik dan Blokade Qatar tahun 2017-2018.
2. Mengetahui alasan Qatar memilih langkah untuk melakukan manuver politik dengan memperkuat aliansinya dengan Iran sebagai langkah menghadapi perang diplomatiknya dengan beberapa negara-negara Kuartet Anti-Qatar di Teluk.

3. Memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang diperoleh Qatar melalui langkah manuver politik yang ia pilih.
4. Mengetahui pola tindakan negara-negara Teluk dalam menyelesaikan konflik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan makalah ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang menjelaskan isu-isu kontemporer dalam Hubungan Internasional, serta menambah wawasan mengenai pengaplikasian ilmu Hubungan Internasional dalam kondisi konflikual antar negara. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menjelaskan mengenai arti penting dari aliansi dalam Hubungan Internasional. Secara spesifik, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai kondisi hubungan Qatar dengan Iran serta pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi politik di wilayah Teluk terkait permasalahan krisis diplomatik yang dialami Qatar pada tahun 2017. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk dijadikan sumber informasi mengenai hal apapun yang berkaitan dengan pergerakan politik seperti manuver politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengimplentasian konsep-konsep neorealis dalam Hubungan Internasional untuk menganalisis isu-isu kontemporer yang menyangkut konflik antarnegara.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis seperti :

1. Mengidentifikasi proses dan kebijakan politik apa yang diangkat oleh negara-negara bersengketa.
2. Mendorong penelitian berikutnya mengenai studi strategis di wilayah Teluk.

1.5. Kerangka Teori

Neorealisme merupakan salah satu paradigma atau perspektif utama yang muncul dalam kajian isu-isu kontemporer dalam Hubungan Internasional. Neorealisme sering juga disebut ‘Realisme struktural’ yang berasumsi bahwa manusia terdiri dari beberapa struktur sistemis yang bekerja sama, begitu pula dengan negara yang seharusnya dilihat dari segala aspek strukturalnya bukan hanya aspek kekuasaan atau politik saja. Dengan menggambarkan sistem politik internasional secara keseluruhan, dengan derajat struktural dan unit yang berbeda yang berhubungan pada waktu yang bersamaan, neorealisme mewujudkan otonomi politik internasional (Waltz, 1979)

Secara lebih spesifik penelitian ini akan menekankan asumsi dasar dalam neorealis yang dirasa sangat penting digunakan untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “sistem internasional yang anarki”. Asumsi tersebut dipilih karena adanya keterkaitan dengan hubungan sebab-akibat yang dapat ditimbulkan dari keadaan yang anarki dalam kasus krisis diplomatik Qatar tahun 2017. Terlebih lagi keadaan struktur internasional yang anarki akan banyak mempengaruhi dan menjelaskan perilaku dari sebuah negara.

“Three features of the international system combine to cause states to fear one another: 1) The absence of a central authority that sits above states and can protect them from each other (anarchy), 2) the fact that states always have some offensive military capability, and 3) the fact that states can never be certain about other states' intentions. Given this fear - which can never be wholly eliminated - states recognize that the more powerful they are relative to their rivals, the better their chances of survival.” (Mearsheimer, 2006)

Bermula dari anggapan Neorealis bahwa sistem internasional yang berlaku saat ini adalah anarki, maka negara dituntut untuk bisa *survive* (Waltz, 1979). Tuntutan negara untuk dapat *survive* tersebut berkaitan dengan asumsi Waltz yang mengartikan sistem internasional anarki sebagai sebuah keadaan dimana tidak ada satupun otoritas yang berhak untuk mengikat dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari negara itu sendiri. Oleh karenanya, ketidakhadiran sebuah otoritas yang

berhak untuk mengatur anggota di dalam sistem, mendorong masing-masing negara untuk dapat mengedepankan prinsip *self-help*, atau dapat dikatakan bahwa negara harus berdiri di atas kaki sendiri dan bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri (Waltz, 1979). Salah satu cara yang dapat dilakukan negara untuk tetap bisa bertahan dalam sistem tersebut menurut Waltz adalah melalui kerjasama. Di balik kerjasama tersebut pasti ada kepentingan nasional yang dijunjung tinggi oleh negara. Untuk itu, negara sebagai aktor rasional pasti akan memikirkan untung rugi. Kerjasama yang menguntungkan akan ia ambil dan sebaliknya, jika merugikan negara akan cenderung tidak mau bekerjasama (Donnelly, 2000).

Untuk dapat bertahan dalam sistem internasional yang anarki, menurut Waltz, *security dilemma* merupakan hal yang wajar terjadi. Dalam struktur internasional yang anarki, negara tidak pernah tahu intensi-intensi apa yang akan dia dapat dari negara lain. Oleh karena itu negara akan cenderung berfikir strategis dalam mengambil langkah untuk menjaga keamanannya. Hal ini juga berkaitan dengan konsep ancaman yang dicetuskan oleh Waltz. Ancaman adalah konsep yang lebih luas daripada kekuasaan, karena mencakup target agregat, kemampuan ofensif, dan pengaruh kekuatan kekuasaan. Pendekatan Waltz menguji keseimbangan dari teori ancaman dengan memeriksa pola aliansi di Timur Tengah. Waltz menemukan bahwa negara benar-benar bereaksi terhadap ancaman, bukan hanya terhadap kekuasaan. Dalam situasi terancam negara akan mengambil sikap untuk mendekati negara lain yang menurutnya dapat dijadikan agregat atau aliansi baru sehingga dapat meningkatkan kemampuan ofensif. Bekerja sama dengan negara besar memang diperlukan, kunci utama dari neorealis adalah keamanan, sehingga hubungan kerjasama antara negara besar dan kecil akan menciptakan *balance of power* yang ditujukan untuk memperkuat keamanan (Waltz, 1979).

Negara-negara yang memiliki kedekatan geografis umumnya memiliki sejarah persengketaan wilayah, perbedaan bahasa, agama atau konflik etnisitas yang menyebabkan institusi regional kurang efektif dalam menjaga stabilitas wilayah. Karena itu peneliti berargumen bahwa *balance of power* masih menjadi jawaban atas *security dilemma* yang terjadi di tingkat regional. Ketika dihadapkan dengan ancaman eksternal yang signifikan, aliansi adalah salah satu cara yang dapat diperhitungkan oleh negara dan negara-negara yang ingin membentuk aliansi dapat

melakukan “*balance*” atau “*bandwagon*”.

” Balancing is defined as allying with others against the prevailing threat, while states that have bandwagoned have aligned with the threat” (Waltz, 1987)

Menurut Stephen M. Walt (1987) dalam bukunya yang berjudul *The Origins of Alliances*, menciptakan *balance of threat* sebagai pembaruan dan mengembangkan capaian *balance of power*. Dimana negara membentuk aliansi sebagai cara untuk memastikan keamanan mereka sendiri dan respon atas ancaman yang berlaku. Negara menyatakan sekutu untuk menyeimbangkan kekuasaan dan melawan ancaman. Motivasi untuk aliansi lebih kepada menyeimbangkan (mempromosikan keamanan) daripada ideologi bersama atau manfaat lain seperti penetrasi politik.

Perilaku aliansi dibagi menjadi dua kategori, antara lain: *balancing dan bandwagoning* (Walt, 1987). Yang Pertama, aliansi *Balancing* merupakan persekutuan antara negara dengan negara lain melawan ancaman yang berlaku. Pada tingkat sistemik, kekuatan besar sekutu dengan kekuatan yang sama melawan agresor atau ancaman. Aliansi kategori ini juga dipertimbangkan di tingkat regional, dimana negara-negara menyiratkan keinginan untuk mempertahankan status quo. Yang Kedua, aliansi *Bandwagoning*. *Bandwagoning* sendiri memiliki arti “sejajar dengan sumber bahaya”, dimana dalam hal ini negara-negara kecil atau lemah bersekutu dengan kekuatan revisionis. Aliansi *bandwagoning* terjadi hanya di bawah kondisi paksaan atau tidak stabil atau tidak pasti. Aliansi kategori ini menyiratkan keinginan untuk menginduksi perubahan sistemik dan atau perilaku mendestabilisasi (Schweller, 1994).

Dari penjelasan di atas, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aliansi kategori *bandwagoning*. Dalam tulisan Randall L.Schweller (1994) terdapat beberapa motivasi yang mendasari suatu negara melakukan *bandwagoning*, yaitu adanya harapan untuk mendapat keuntungan dan keseimbangan *power* dengan musuh dilakukan untuk keamanan dan disadari bahwa tindakan tersebut selalu membutuhkan biaya (Shweller, 1994). Oleh karena itu dalam *bandwagoning*, aliansi merupakan tindakan yang dianggap positif.

Menurut Stephen Walt (1987 dalam Paul, 2004:11) *bandwagoning* adalah kebalikan dari *balancing* dimana negara memilih untuk bekerja sama dengan *dominant power*, bukan mengimbangi, selain karena merasa terancam oleh kekuatan negara tersebut juga untuk memetik keuntungan atau dalam sebutan Walt *spoils of victory*. *Bandwagon* sendiri merupakan suatu upaya negara yang memiliki *power* yang lebih kecil untuk bergabung dan mengikuti negara yang memiliki *power* lebih besar untuk mendapatkan tambahan kekuatan dan keamanan bagi negaranya. *Bandwagoning* akan dilakukan oleh negara apabila sedang dalam keadaan konfliktual dengan negara lain yang memiliki *power* lebih besar dari negaranya. Untuk mengamankan kondisi domestiknya, negara kecil yang terlibat konflik akan cenderung membentuk aliansi baru dengan negara lain yang memiliki kekuatan lebih besar darinya untuk menghadapi perlawanan dari negara musuhnya.

Dalam *bandwagoning* negara yang membutuhkan bantuan tidak terlalu memikirkan keuntungan yang besar untuk dia dapatkan ketika membentuk aliansi baru dengan negara lain. Maka keuntungan yang akan diutamakan adalah *relative gains* atau keuntungan relative. Neorealis berasumsi bahwa negara memperhatikan keuntungan relative. Bagi Waltz, “negara yang merasa tidak aman harus bertanya bagaimana keuntungan akan dibagi. Mereka tidak bertanya ‘Akankah kita berdua akan untung?’, tapi ‘Siapa yang akan lebih diuntungkan?’ (Waltz, 1979). Setiap dua negara yang mempertimbangkan kerjasama harus mempertimbangkan bagaimana keuntungan akan didistribusikan untuk kedua belah pihak. Dengan keuntungan relatif, di sisi lain, masing-masing pihak menganggap tidak hanya keuntungan individualnya sendiri, tetapi juga seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh pihak lain (Mearsheimer, 2001).

Bandwagoning dalam hubungan internasional terjadi ketika sebuah negara bersekutu dengan negara musuh yang lebih kuat dan mengakui bahwa teman-tapi-musuh tersebut mengambil untung dari perampasan yang mereka rebut bersama-sama (Mearsheimer, 2001 hlm 162-163). *Bandwagoning* adalah strategi yang diambil oleh negara-negara lemah. Menurut konsep ini, negara yang lemah harus berteman dengan musuh yang lebih kuat karena negara musuh dapat menguasai apapun yang diinginkannya secara paksa (Mearsheimer, 2001 hlm 163).

Kata *bandwagoning* diciptakan oleh Quincy Wright dalam *A Study of War* (1942) dan dipopulerkan oleh Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics* (1979). *Bandwagoning* terjadi ketika negara lemah memutuskan bahwa biaya melawan negara yang lebih kuat justru lebih mahal daripada keuntungan yang didapatkan (Mearsheimer, 2001). Negara kuat biasanya menawarkan insentif, misalnya penambahan wilayah, perjanjian dagang, atau perlindungan, agar negara lemah mau bekerja sama dengan mereka (Mearsheimer, 2001).

Bandwagoning terjadi ketika negara kecil atau lemah mendapat ancaman atau sedang dalam kondisi konfliktual dengan negara yang lebih kuat. Dengan demikian, *bandwagons roll* terjadi ketika sistem dalam keadaan tidak tentu, baik ketika *status-quo order* mulai terurai atau ketika struktur sistem baru sedang diberlakukan. Dalam studi kasus penelitian ini, hal tersebut terjadi ketika beberapa negara GCC memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar dan ketika Qatar tidak mau memenuhi 13 tuntutan yang dilayangkan karena dianggap merugikan negaranya, saat itulah *status quo order* dalam GCC mulai terurai sehingga Qatar mengalami krisis diplomatik dan berusaha bertahan sendiri tanpa hegemon dari negara maupun Dewan Kerjasama manapun. Untuk *survive* dalam kondisi tersebut, Qatar memutar arah politik dan ekonominya kepada Iran. Walaupun Iran merupakan pihak musuh didalam koalisi GCC tetapi Qatar menganggap bekerjasama dengan Iran adalah hal yang lebih menguntungkan daripada bertahan dalam struktur GCC yang akan terus merugikan dirinya.

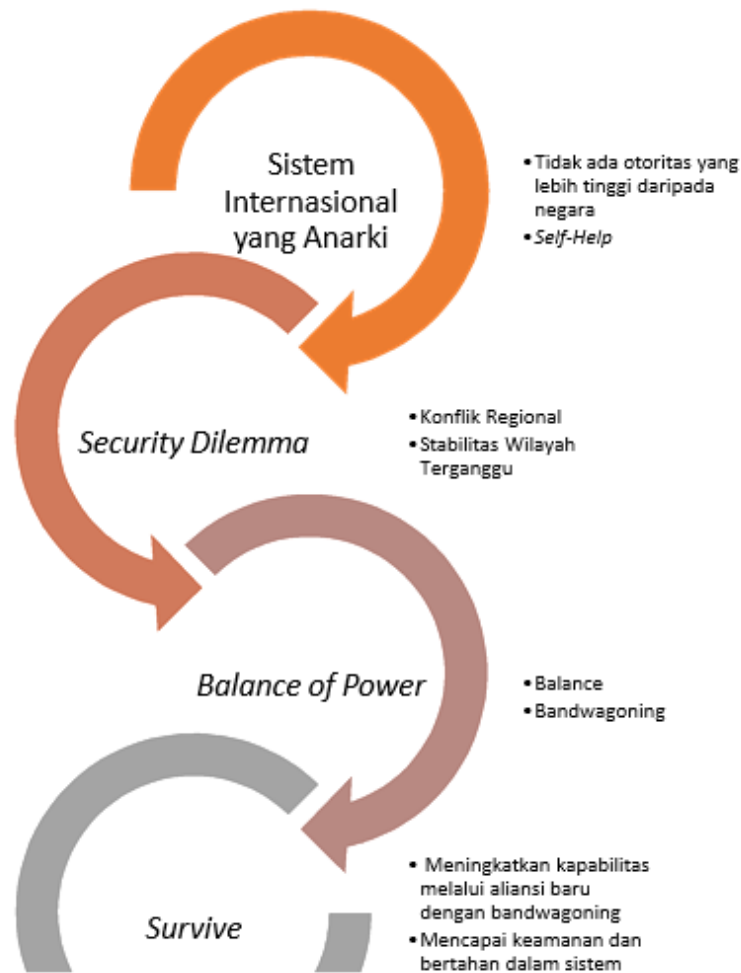
Adapun maksud dan ketentuan dalam *bandwagoning* dijelaskan oleh Randall L.Schweller (1994) sebagai berikut : Kekuatan besar yang tergabung dalam *bandwagon* cenderung memilih untuk tetap berada diposisi tengah-tengah antara negara lemah *bandwagon*-nya dan agresor, dengan harapan menghindari biaya tinggi dalam menyeimbangkan. Artinya negara kuat tersebut tidak akan melawan agresor sampai benar-benar diserang. Negara kuat mau bergabung menjadi aliansi *bandwagon* karena telah mengantisipasi keuntungan berada di pihak yang menang. Artinya negara kuat juga akan memperhitungkan aliansi *bandwagoning*-nya sesuai dengan kemampuan negara tersebut untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam aliansinya dengan Qatar, Teheran telah memperhitungkan segala sesuatunya dan memutuskan bahwa Qatar adalah negara kecil namun sangat kaya sehingga

dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Randall L.Schweller (1994) menyatakan *bandwagoning* dilakukan dengan tujuan untuk mendapat manfaat dari-atau, setidaknya, untuk menghadapi kegagalan dalam penyelesaian damai yang sebelumnya pernah dilakukan.

Konsep aliansi *bandwagoning* dan *relative gains* mendukung salah satu argumen dalam penelitian ini bahwa perbedaan kapabilitas dan kapasitas kekuatan Qatar melawan Arab Saudi dan beberapa negara GCC lainnya yang tergabung dalam Kuartet anti-Qatar menyebabkan sebuah kooperasi yang lebih erat antara Qatar dan Iran yaitu berupa aliansi *bandwagoning* yang dilaksanakan dengan motif keamanan melalui kerjasama dibidang ekonomi dan politik yang akan menguntungkan pihak yang memiliki power lebih kuat yaitu Iran. Iran di dalam aliansi ini berperan sebagai negara yang memiliki *power* lebih kuat dibanding Qatar. Qatar merupakan negara yang merasa tidak aman dan membutuhkan Iran untuk menstabilkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di dalam negaranya serta sebagai aliansi *bandwagoning* untuk melawan intimidasi negara Kuartet. Hal tersebut terjadi karena Qatar ingin mencapai keamanan dan bertahan dalam dunia internasional yang anarki.

Dalam penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa aktor rasional akan memperkirakan untung rugi dalam suatu kerjasama yang ia lakukan. Hal tersebut dterapkan oleh Qatar ketika melihat kerugian apabila menuruti 13 tuntutan yang dilayangkan oleh negara Kuartet Anti-Qatar. Melihat tidak adanya upaya menguntungkan lainnya yang ditawarkan oleh GCC (*Gulf Cooperation Council*) Qatar memilih untuk tetap berada dalam posisi Krisis diplomatiknya di antara beberapa negara GCC tersebut, dan mempererat hubungan diplomatiknya dengan Iran. Hal tersebut memang merugikan posisi Qatar di dalam organisasi GCC tetapi masih lebih menguntungkan bagi stabilitas domestiknya.

Bagan 1. 1 Alur berpikir untuk menganalisis rumusan masalah



1.6.Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya konflik regional di Teluk Persia yang menyebabkan Krisis diplomatik Qatar pada akhirnya menimbulkan kebijakan manuver politik Qatar dengan Iran untuk menghadapi intimidasi Kuartet Anti- Qatar. Dalam kasus tersebut, penguatan aliansi Qatar-Iran merupakan bentuk dari *self-help* yang dipilih Qatar untuk tetap bertahan di dalam sistem internasional yang anarki. Dalam kasus ini, *balance of power* menjadi jawaban atas *security dilemma* yang dihadapi oleh Qatar. Dalam menghadapi tekanan atau ancaman eksternal dari Kuartet, Qatar memutuskan untuk melakukan *bandwagoning* dengan Iran. Sehingga aliansi yang terbentuk antara Qatar dan Iran merupakan aliansi informal yang dalam praktiknya berbentuk aliansi *bandwagoning*. Didasari oleh beberapa motif keamanan melalui kerjasama dibidang ekonomi, politik maupun sosial, beraliansi dengan Iran merupakan pilihan yang lebih menguntungkan

dibanding memenuhi tuntutan penyelesaian yang diajukan oleh Kuartet. Aliansi *Bandwagoning* antara Qatar dan Iran akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi Qatar antara lain: meningkatkan kapabilitas domestik, mencapai keamanan dan bertahan dalam sistem internasional yang anarki.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Manuver Politik

Untuk menjelaskan mengenai istilah Manuver Politik, perlu dilakukan pemisahan arti terlebih dahulu untuk mempermudah pendefinisian. Manuver Politik adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Manuver dan Politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuver diartikan sebagai gerakan yang tangkas dan cepat dari pasukan dalam perang, dan manuver dalam bidang politik diartikan sebagai gerakan yang cepat dalam urusan politik. Sedangkan politik sendiri menurut Prof. Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan (Budiardjo, 2008). Sedangkan menurut Johann Kaspar Bluntschli, Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, dalam politik terdapat tujuan untuk mengamati tindakan hukum atas fakta-fakta dan mempertimbangkan bagaimana menghindari konsekuensi yang merugikan bagi negara dan memperbaiki cacat pengaturan yang ada (Bluntschli, 2000 p.13).

Sehingga manuver politik dapat diartikan sebagai gerakan cepat yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan dengan tujuan untuk mengamati tindakan hukum atas fakta-fakta dan mempertimbangkan bagaimana menghindari konsekuensi yang

merugikan bagi negara dan memperbaiki cacat pengaturan yang ada yang hasilnya adalah menemukan perumusan baru untuk tujuan kestabilan dan keamanan negara.

1.7.1.2. Aliansi

Aliansi menurut Griffith dan Terry (2002) aliansi merupakan kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk bekerja sama dalam masalah keamanan secara timbal balik. Negara-negara masuk ke dalam pengaturan keamanan melalui kerja sama dengan tujuan untuk melindungi diri dari ancaman yang berlaku. Dengan mengumpulkan sumber daya mereka dan bertindak bersama-sama, mitra aliansi percaya bahwa mereka dapat meningkatkan posisi kekuasaan mereka secara keseluruhan dalam sistem internasional dan mewujudkan keamanan relatif terhadap negara-negara di luar aliansi. (O'Callaghan, 2002)

Aliansi dapat berupa kesepakatan formal atau informal (O'Callaghan, 2002). Aliansi formal diakui secara umum melalui penandatanganan perjanjian di mana penandatanganan berjanji untuk menganggap ancaman yang ditujukan kepada salah satu dari anggotanya menjadi ancaman bersama (O'Callaghan, 2002). Aliansi informal jauh lebih longgar, kurang stabil dan bergantung hanya kepada pihak yang terlibat terkait keberkelanjutan kerjasama yang terjadi di antara mereka (O'Callaghan, 2002). Aliansi informal juga dapat berupa perjanjian rahasia antara para pemimpin (O'Callaghan, 2002).

Di dunia Internasional yang anarki, negara beraliansi dengan tujuan untuk lebih memilih menyeimbangkan ancaman daripada melawan *power* (kekuasaan) ancaman seorang diri. Selain itu, negara juga dapat mengimbangi biaya pertahanan. Contohnya, jauh lebih murah bagi negara untuk bersekutu dengan negara yang lebih kuat yang memiliki kemampuan nuklir daripada negara tersebut membangun dan memelihara infrastrukturnya sendiri, mengasah keahlian teknologi, dan membuat sistem pengiriman senjatanya sendiri. Hal ini membuat aliansi sangat menarik bagi negara-negara kecil dan rentan (O'Callaghan, 2002). Aliansi juga dapat

memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, bantuan, dan pinjaman antara mitra aliansi (O'Callaghan,2002).

1.7.1.3. Bandwagoning

Bandwagoning dalam penelitian ini merupakan turunan dari kategori aliansi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Secara konseptual, *bandwagoning* menurut Kenneth Waltz (1978) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara yang memiliki *power* sedikit untuk bergabung mengikuti negara yang memiliki *power* lebih besar demi mendapat tambahan kekuatan dan keamanan bagi negaranya dalam rangka menghadapi ancaman yang berlaku. *Bandwagoning* sendiri memiliki arti “sejajar dengan sumber bahaya”, dimana dalam hal ini negara- negara kecil atau lemah bersekutu dengan kekuatan revisionis. *Bandwagoning* terjadi hanya di bawah kondisi paksaan atau tidak stabil atau tidak pasti. Aliansi kategori ini menyiratkan keinginan untuk menginduksi perubahan sistemik dan atau perilaku mendestabilisasi (Schweller, 1994).

1.7.1.4. Aliansi Bandwagoning

Menurut Stephen M. Walt (1987) perilaku negara dalam membentuk aliansi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu : *Balancing* dan *Bandwagoning*. Sesuai dengan arah analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kategori aliansi yang kedua yaitu, *bandwagoning*. Beberapa unsur perilaku negara dalam melakukan aliansi *bandwagoning* menurut Stephen M. Walt antara lain: Bentuk umum dari aliansi ini adalah negara-negara yang menghadapi ancaman eksternal akan bersekutu atau beraliansi dengan kekuatan yang paling mengancam bagi kekuatan musuh; Semakin besar kemampuan agregat suatu negara, semakin besar kecenderungan negara lain untuk menyelaraskan; Keselarasan semakin mungkin terjadi ketika aktor negara yang terlibat memiliki kedekatan dengan negara kuat; Semakin besar kemampuan ofensif suatu negara, semakin besar kecenderungan negara lain untuk menyelaraskan; Semakin agresif niat yang dirasakan suatu negara, semakin sedikit kemungkinan negara-negara lain

untuk menyelaraskan; Aliansi yang dibentuk untuk melawan ancaman akan terpecah ketika ancaman menjadi serius. (Walt, 1987) Ketika negara merespon ancaman dengan cara *bandwagoning*, maka jalan keluar yang ia pilih adalah beraliansi atau sejajar dengan sumber bahaya. Ketika aliansi *bandwagoning* memang terjadi, maka hal tersebut biasanya akan dilakukan oleh negara-negara yang lebih lemah. Alasannya adalah karena mereka "lebih rentan terhadap tekanan" dan karena sumber daya mereka akan melemah jika tidak bersekutu. Aliansi *Bandwagoning* juga terjadi karena adanya unsur "terpaksa", artinya hanya terjadi ketika sekutu benar-benar tidak tersedia dan ketika para pemimpin percaya bahwa negara-negara yang berpotensi mengancam dapat diredakan melalui aliansi *bandwagoning*. Selain itu, Walt menyimpulkan bahwa kesamaan ideologis dan instrumen yang disponsori negara untuk meningkatkan komitmen aliansi, seperti bantuan ekonomi dan militer asing, berada di bawah preferensi keamanan dalam pembentukan aliansi.

1.7.1.5. Krisis Diplomasi

Untuk menerjemahkan Krisis Diplomasi juga dibutuhkan pemisahan makna terlebih dahulu dari dua kata yang terkandung. Pertama, Krisis dalam Kamus Hubungan Internasional karangan Khasan Ashari (2015) diartikan sebagai situasi yang dihadapi pengambil kebijakan yang ditandai dengan tiga karakteristik, yaitu: 1) terjadi peristiwa yang mengejutkan; 2) peristiwa tersebut mendatangkan ancaman; 3) waktu yang digunakan untuk bertindak sangat terbatas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Krisis diartikan sebagai keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, keadaan suram dalam bidang ekonomi, moral, dan sebagainya.

Diplomasi menurut pendapat Nietzsche merupakan konsep yang sebenarnya tidak dapat sepenuhnya diartikan secara konkret karena terdapat beberapa ambiguitas. Tetapi sesuai dengan penggunaan 'diplomasi' saat ini, maka diplomasi dapat merujuk pada praktik diplomat, khususnya perundingan, juga keterampilan dalam melakukan hubungan internasional (Leira, 2016). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diplomasi diartikan

sebagai urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain. Sehingga krisis diplomasi dapat diartikan sebagai keadaan genting yang mendatangkan ancaman secara tiba-tiba yang menyerang sektor negara khususnya dalam urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dan negara lain. Ancaman yang terjadi datang dari satu negara yang menyerang negara lain, biasanya dengan cara pemutusan hubungan kerjasama antarnegara bahkan pemutusan segala bentuk interaksi antar negara tersebut. Akibatnya negara yang diserang mengalami kesuraman ekonomi dan politik dalam hubungan antarnegara dan antarbangsanya.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1. Manuver Politik

Berdasarkan penjelasan mengenai manuver politik dalam definisi konseptual, penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator yang terkandung dalam manuver politik, antara lain :

1. Langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan Qatar dengan negara-negara tetangga yang dianggap melangkahi dominasi Arab Saudi di Teluk.
2. Pergerakan dan langkah cepat Qatar dalam urusan politik yaitu dengan merubah arah kebijakan luar negerinya dari *Gulf Cooperation Council* menjadi condong ke Iran.
3. Keputusan Qatar untuk mengembalikan Duta Besarnya ke Teheran, Iran. Dimana keputusan tersebut menentang tuntutan Arab Saudi dan beberapa sekutu Arab bahwa Doha seharusnya memutuskan hubungan dalam hal apapun dengan Teheran.

1.7.2.2. Aliansi

Berangkat dari penjelasan mengenai aliansi dalam definisi konseptual, aliansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aliansi

informal yang terjalin antara Qatar dan Iran. Indikator aliansi informal antara Qatar dan Iran dalam penelitian ini antara lain:

1. Ketika Qatar melalui Menteri Luar Negerinya, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani berbicara melalui telepon kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif. Dimana negara Qatar menyatakan aspirasinya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Republik Islam Iran di semua bidang.
2. Di kemudian hari, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyambut langkah pemerintah Qatar untuk mengembalikan duta besar. Sebagai wujud dari penerimaan tersebut, Iran langsung mengirimkan persediaan makanan dan membuka *airspace* Iran untuk dilewati Qatar.

1.7.2.3. Bandwagoning

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan sikap *bandwagoning* yang terjadi antara Qatar dan Iran pada waktu terjadinya Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017 karena adanya blokade dan pemutusan hubungan diplomatik besar- besaran oleh beberapa sekutu Qatar di *Gulf Cooperation Council*: Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan sekutu mereka Mesir. Berdasarkan penjelasan mengenai definisi konsep *bandwagoning*, maka indikator *bandwagoning* yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain ketika:

1. Qatar menghadapi ancaman dan tekanan dari Kuartet akan bersekutu dengan kekuatan yang paling mengancam bagi Kuartet yaitu Iran.
2. Qatar kembali memperbaiki hubungannya dengan Iran dengan tujuan untuk mendapatkan *power* dan keamanan tambahan untuk menghadapi ancaman Kuartet Anti-Qatar (Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir) dalam kasus Krisis Diplomatik Qatar yang

terjadi di tahun 2017, dikarenakan Qatar merasa Iran memiliki kedekatan dengan negaranya, kemampuan agregat yang cukup besar, dan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan bantuan dalam menghadapi Krisis Diplomatiknya.

1.7.2.4. Aliansi *Bandwagoning*

Dalam penelitian ini, aliansi *bandwagoning* merupakan langkah yang akan diteliti dalam penelitian ini sekaligus menjadi pisau analisis dalam mempelajari pola hubungan Qatar dan Iran dalam kasus di penelitian ini. Indikator yang terkandung dalam aliansi *bandwagoning* yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain

1. Aliansi antara Qatar-Iran yang secara tersirat terjadi ketika Qatar berada dalam posisi rentan terhadap tekanan dan ancaman Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir dan tidak mampu memenuhi 13 tuntutan yang dilayangkan sehingga konflik antara mereka nihil untuk penyelesaian, Qatar memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan Iran dan mempererat aliansi antar kedua negara tersebut dengan tujuan untuk menghadapi ancaman yang berlaku dalam Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017.
2. Keputusan Qatar untuk memulihkan hubungan dengan Iran yang terjadi di tengah perselisihan diplomatik antara Qatar dan negara-negara Arab lainnya, termasuk Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir.

1.7.2.5. Krisis Diplomasi

Indikator yang terkandung dalam krisis diplomasi yang akan digunakan sebagai arah analisis penelitian ini antara lain :

1. Keadaan dimana suatu negara tidak memiliki atau sedang dalam keadaan minim hubungan resmi antar negara karena mengalami perseteruan atau konflik antar negara, yang bisa menyebabkan negara lawan

memutuskan hubungan diplomasinya. Semakin banyak negara yang ikut dalam misi pemutusan hubungan diplomasi dengan negara target maka semakin suram kondisi ekonomi, politik, dan keamanan negara tersebut.

2. Krisis Diplomatik yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah peristiwa pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar dengan melakukan blokade jalur penerbangan dan perjalanan pada tahun 2017 silam. Sehingga hubungan resmi antar negara Qatar di wilayah Teluk Persia sangat minim.

1.7.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Susan E. Wyse: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Penelitian ini ditunjukkan untuk memperoleh wawasan dalam suatu masalah serta membantu untuk mengembangkan ide-ide atau hipotesis. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mengungkapkan *trends* di balik sebuah pikiran dan pendapat, dan membuat kita dapat menyelam lebih dalam ke masalah yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan rinci dan lengkap terhadap topik penelitian (Lamont, 2015). Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa analisis deskriptif. Dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data yang diperlukan dan relevan kemudian disusun untuk selanjutnya dianalisa menggunakan metode yang telah ditentukan.

Tujuan lainnya adalah untuk menemukan hubungan dan pengaruh dari peristiwa yang terjadi terhadap kehidupan di dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti berusaha untuk mencari hubungan sebab-akibat dari kasus yang diteliti dengan menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari suatu

kebijakan, fenomena, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus yang diteliti akan dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Sehingga dalam tipe penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan Creswell (2012:20).

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan sebab atau faktor-faktor terjadinya penguatan aliansi Qatar-Iran ditengah Krisis Diplomatik yang dialami Qatar di tahun 2017. Iran merupakan agresor terbesar di dalam wilayah Teluk Persia, Iran juga merupakan salah satu penyebab utama Qatar mengalami Krisis Diplomasi di tahun 2017, tetapi pasca krisis Qatar lebih memilih melakukan manuver politik dengan Iran daripada patuh pada tuntutan negara-negara Teluk dan kembali kepada aliansi GCC. Hal tersebut sedikit menggambarkan dengan adanya blokade terhadap Qatar, GCC dianggap gagal dalam mempertahankan Qatar. Bukan hanya disebabkan oleh hal tersebut, beralihnya Qatar kepada Iran juga disebabkan oleh kegagalan 13 tuntutan yang diajukan oleh Kuartet anti-Qatar. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menjelaskan akibat yang memicu faktor-faktor pendorong Qatar melakukan manuver politik dengan Iran dan akibatnya terhadap kondisi Krisis Diplomatiknya di tahun 2017. Penelitian ini juga akan menjelaskan hubungan atau aliansi baru antara Qatar-Iran beserta kebijakan dan hasil kerja sama kedua negara tersebut dalam menghadapi aksi-aksi blokade negara-negara kuartet anti Qatar sejak tahun 2017 sampai sekarang.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu pada penelitian ini meliputi batasan tahun 2017 sampai sekarang dan meliputi batasan ruang yaitu Qatar dan Iran. Batasan waktu dimulai pada tahun 2017 karena pada tahun tersebut Qatar mengalami kondisi krisis diplomatik paling parah sepanjang hubungan antar negara-negara Teluk berlangsung. Tahun 2017 juga menjadi titik depresi ekonomi Qatar paling tinggi akibat blokade dalam bidang penerbangan dan perjalanan oleh beberapa negara kuartet anti-Qatar. Dan di tahun 2017 juga merupakan kegagalan manuver Riyadh

untuk menarik kembali Doha karena terjadi manuver politik lain yaitu titik balik hubungan Doha dengan Teheran. Dan jangkauan waktu dalam penelitian ini berakhir sampai sekarang karena peristiwa ini masih berjalan dan berkembang sampai saat ini.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data meliputi : teknik kepustakaan (*Library Research*) dan metode berbasis internet. Teknik kepustakaan atau Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data berdasarkan sumber bahan pustaka atau bahan sekunder. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,2003: 27). Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji atau diteliti. Informasi dan data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, undang-undang, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, surat kabar, dan informasi tertulis lainnya.

Sedangkan metode pengumpulan data berbasis internet adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan jaringan internet. Informasi yang didapat berasal dari jurnal-jurnal umum, website ilmiah yang terpercaya dan terbukti kredibilitasnya, website resmi negara, dan media-media sosial lainnya yang terbukti kredibilitasnya. Situs dan laman web merupakan sumber data yang potensial untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Karena era globalisasi ini, sumber informasi dapat secara cepat diperbarui secara online.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, peneliti akan menggunakan teknik kongruen. Dimana peneliti akan menggunakan beberapa asumsi dasar dari suatu teori untuk kemudian dicocokkan dengan fakta-fakta dan bukti data-data yang diperoleh peneliti selama penyusunan penelitian ini. Untuk proses lebih lanjut, penelitian ini akan menggabungkan teknik kongruen tersebut dengan tiga tahap penelitian kualitatif Miles dan Hebermas. Menurut Miles dan Hebermas, dalam

analisa data kualitatif akan melalui tiga tahap yang harus dilalui peneliti secara berurutan, yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahap tersebut terjadi secara berurutan dengan skema waktu yang terjadi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data, dimana setelah terkumpul data-data tersebut disusun secara sejajar dan menghasilkan wawasan umum atau yang sering disebut dengan analisa (Silalahi, 2009: 339).

a. Reduksi data

Reduksi data berarti proses analisis dalam hal melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang telah didapatkan oleh peneliti melalui hasil pencarian data di lapangan maupun dari sumber-sumber data yang relevan. Kegiatan reduksi data berjalan terus-menerus selama proses analisa data kualitatif berlangsung. Dalam proses reduksi data akan muncul beberapa hal, seperti ringkasan data, menelusuri tema, pengkodean data, sampai pembuatan memo. Reduksi data berfungsi untuk mengkerucutkan suatu masalah, membuang informasi-informasi yang tidak perlu, menyederhanakan data. Sehingga peneliti dapat dengan mudah menarik suatu kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang ia tarik (Silalahi, 2009).

b. Penyajian Data

Penyajian data berarti sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan, verifikasi kesimpulan, dan pengambilan solusi sebagai hasil dari suatu analisis data (Silalahi, 2009 : 304). Penyajian data yang sering digunakan dalam analisis kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif yang jumlah halamannya sesuai dengan kemampuan manusia dalam memproses suatu informasi. Penyajian data ini akan disusun sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat secara ringan dan mudah untuk dipahami (Silalahi, 2009).

c. Penarikan kesimpulan.

Menarik kesimpulan adalah hal penting yang dapat dilakukan oleh seorang penulis setelah ia melalui tahap pencarian data, pengolahan data, perangkuman atau penyederhanaan data, penulusuran tema, pengkodean data, dan penyajian data. Data yang telah disusun pada dua tahap sebelumnya akan memudahkan penulis dalam menemukan kesimpulan pada suatu analisis. Biasanya penulis sudah dapat menarik kesimpulan sementara pada awal pemrosesan data, dalam tahap ini kesimpulan yang sebelumnya telah ditarik oleh penulis dapat semakin dimatangkan melalui tahap ini (Silalahi, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian berupa penjelasan mengenai sebab-akibat penguatan aliansi Qatar-Iran pasca krisis diplomatik Qatar tahun 2017, serta untuk melihat makna dan penjelasan tentang penyebab-penyebab yang mendasari peristiwa tersebut melalui penempatannya di dalam satu konteks sosial yang spesifik. Oleh karena itu, kualitatif merupakan teknik analisis yang tepat untuk digunakan.

1.7.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, antara lain :

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini. Bab II berisi penggambaran dinamika kerenggangan hubungan diplomatik antara Qatar dengan beberapa negara Kuartet Anti-Qatar sejak pecahnya konflik regional tahun 2011 sampai puncak Krisis Diplomatik dan blokade Qatar tahun 2017, pembahasan mengenai blokade dan sikap-sikap pemutusan hubungan diplomasi yang pernah dilakukan negara Kuartet kepada Qatar, dan pembahasan mengenai upaya-upaya mediasi yang pernah diadakan untuk menurunkan tensi konflik antara Qatar dengan pihak-pihak bersitegang namun gagal.

Bab III akan membahas mengenai analisis munculnya faktor pendorong manuver politik Qatar yaitu memperkuat aliansinya dengan Iran. Sehingga dalam bab ini fokus utamanya adalah analisa lebih dalam mengenai hubungan Qatar-Iran dalam menghadapi Krisis Diplomatik dan Blokade Qatar tahun 2017-2018 dan analisis efek apa saja yang muncul dari kebijakan Qatar tentang hubungannya dengan Iran. Secara spesifik dalam bab ini akan diuraikan kerja sama dari kedua negara tersebut, dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak terutama Qatar dalam menghadapi krisis.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan, saran, dan evaluasi kekurangan dalam penelitian ini, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Dalam kesimpulan juga akan diketahui apakah argumen utama dalam penelitian ini sesuai dengan hasil analisis akhir atau mungkin tidak sesuai.